



Journal of Scientech Research and Development

Volume 5, Issue 1, June 2023

P-ISSN 2715-6974

E-ISSN 2715-5846

Open Access at: <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA AIR DI KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN (STUDI PERAN DINAS PARIWISATA DALAM MEMAJUKAN PARIWISATA AIR DI KOTA PALEMBANG)

IMPLEMENTATION OF WATER TOURISM POLICY IN PALEMBANG CITY, SOUTH SUMATRA (STUDY OF THE ROLE OF THE TOURISM OFFICE IN PROMOTING WATER TOURISM IN PALEMBANG CITY)

Erwin Firdaus¹, Indra Kristian²

^{1,3}Universitas Widyatama

²Universitas Al Ghifari

E-mail: erwin.firdaus@widyatama.ac.id

Diterima tanggal 1 Desember 2022, disetujui tanggal 23 April 2023

INFO ARTIKEL

Koresponden:

Erwin Firdaus
erwin.firdaus@widyatama.ac.id

Kata kunci
Pembangunan
Pariwisata
Kebijakan
kejahteraan

Website:
<http://idm.or.id/JSCR>

hal: 155 - 164

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, melibatkan dan memberdayakan masyarakat, serta memajukan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan pembangunan kota yang indah harus didukung oleh masyarakat setempat dan pemerintah daerah tanpa kecuali. Pembangunan berupa fisik. Keberhasilan pariwisata dalam mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati memerlukan keseriusan semua pihak dalam mengikuti kesejahteraan masyarakat. Perlunya penelitian berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, demi tercapainya tujuan Nasional dalam mensejahterakan masyarakat.

Copyright © 2023 JSR. All rights reserved.

| ARTICLE INFO | ABSTRACT |
|--|---|
| <p>Correspondent:</p> <p>Erwin Firdaus erwin.firdaus@widyatama.ac.id</p> <p>Keywords: Development Tourist Policy Welfare</p> <p>Website: http://idm.or.id/JSCR</p> <p>page: 155 - 164</p> | <p><i>The implementation of Regional Government is aimed at Improving Community Welfare through Service Improvement, Empowerment and Participation of the Community, as well as the Community, as well as Increasing Regional Development. Increasing the development of a beautiful city must be supported by the local community and local government without exception. Physical development. The success of tourism in following the rules that have been agreed upon requires the seriousness of all parties in following the welfare of the community. The need for research related to the implementation of local government in improving services and community empowerment, in order to achieve national masters in the welfare of society.</i></p> <p style="text-align: right;"><small>Copyright © 2023 JSR. All rights reserved.</small></p> |

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, melibatkan dan memberdayakan masyarakat, serta memajukan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Kristian I. dan Sudrajat Y.: 2022). Penduduk setempat dan pemerintah daerah harus selalu mendorong pembangunan fisik untuk meningkatkan pertumbuhan kota yang indah. Tujuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan bukan untuk kepentingan individu atau kelompok, melainkan kesejahteraan masyarakat setempat pada khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Kota Palembang belum menerapkan wisata air dengan sebaik mungkin; Agar pariwisata berhasil untuk kepentingan masyarakat, semua pihak harus bersungguh-sungguh mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Keindahan pesona alam lokal dan sekitarnya patut dinikmati oleh seluruh masyarakat pendatang selain sebagai sumber kebutuhan rumah tangga karena melimpahnya sumber air di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, bahkan dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian untuk masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan harus seimbang antara pembangunan daerah khususnya bidang pariwisata dengan tercapainya kesejahteraan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat pendatang. Karena pemerintah daerah telah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi mereka untuk menjalankan tugasnya sebagai rakyat perwakilan, semua pihak harus mendukung setiap kepentingan ekonomi yang tidak memihak pada kepentingan masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran penelitian yang digunakan untuk mengungkap masalah dalam sistem dan operasi sehari-hari organisasi pemerintah dalam meningkatkan pariwisata, pendekatan penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Untuk menyelidiki dan memahami fenomena yang sedang terjadi, khususnya berkaitan dengan strategi pengembangan daya tarik wisata di Kawasan Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu, penulis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian yang dilakukan pada setting khusus yang ada secara nyata. Pendekatan kualitatif karena didasarkan pada data atau realitas yang dialami di lapangan (HS, Y.T.; Kristian, I.; 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Dalam rangka meningkatkan wisata air di Kota Palembang perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya kebersihan di tepi Sungai Musi. Peneliti menerapkan teori Edward III, khususnya ketika menanggapi rumusan masalah, dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011).

Agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan segala persoalan yang terkait dengan implementasi kebijakan, serta agar proses berjalan efektif dan sejalan dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri, lanjut Widodo dengan menyatakan bahwa informasi harus diberikan kepada para pelaku kebijakan sehingga mereka dapat memahami isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran (*target group*) dari kebijakan tersebut.

Transformasi informasi (*transmission*), kejelasan informasi (*clarity*), dan konsistensi informasi (*consistency*) merupakan tiga aspek krusial komunikasi dalam implementasi kebijakan. Informasi harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran dan pihak terkait lainnya selain kepada pelaksana kebijakan untuk memenuhi persyaratan dimensi transformasi. Agar tidak terjadi salah tafsir oleh pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimensi kejelasan mensyaratkan pemberian informasi yang jelas dan mudah dipahami. Dimensi konsistensi, sebaliknya, mengamanatkan bahwa informasi yang disajikan harus konsisten agar tidak membingungkan pelaksana kebijakan, khalayak sasaran, dan pihak terkait.

Meski tidak semua berjalan sesuai rencana, komunikasi yang baik akan mendorong masyarakat untuk mengikuti kebijakan yang telah dibuat. Komunikasi merupakan langkah awal dalam mengambil langkah selanjutnya karena mengubah sesuatu yang

sudah terbentuk memang sangat sulit namun hanya bisa mengubahnya ke arah yang lebih baik agar mudah menerima dan merasakan manfaatnya.

Komunikasi merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan bagi program yang sudah direncanakan sebelumnya dengan mengadakan kunjungan dan memberikan pengarahan kepada masyarakat tian RT dan RW sekitar sungai musi akan pentingnya kesehatan melalui menjaga kebersihan lingkungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta mengadakan promosi atau sosialisasi kepada penduduk, penjual, pebisnis dan lain-lain agar mengerti dan memahami akan program yang akan dijalankan, contoh kecil saja menjaga kelestarian asset yang dimiliki. Secara umum komunikasi bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat yang terkait untuk sama-sama menjaga dan melestarikan asset yang dimiliki dan mengembangkan potensi yang ada.

Peran pemerintah daerah dalam dalam hal ini dinas pariwisata dalam mengimplementasikan kebijakan pariwisata air di sekitar sungai musi (Ogan Komering Ilir) dan (Ogan Komering Ulu) pariwisata ini harus di didukung oleh setiap lapisan masyarakat didasarkan pada prinsip profesional dan transparan. Namun, pada kenyataannya beberapa pihak masih sulit melibatkan diri dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan ada kendala terkait kemampuan ekonomi terbatas sehingga lebih mengutamakan kepentingan pribadi dalam menyambung hidup. Temuan di lapangan peneliti mengidentifikasi bahwa dengan komunikasi sedikit banyak akan membantu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memainkan pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam Widodo (2011), Edward III membuat pernyataan sebagai berikut: "Betapapun jelas dan konsistennya ketentuan dan aturan tersebut, dan bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan atau aturan tersebut, implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif."

Sumber daya ini, yang diuraikan sebagai berikut, meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan otoritas:

1. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Tanpa bantuan sumber daya manusia yang cukup kuantitas dan kualitasnya, implementasi kebijakan akan gagal. Kuantitas sumber daya manusia menentukan apakah cukup untuk melayani semua kelompok sasaran, kualitas sumber daya manusia mengacu pada pengetahuan, komitmen, profesionalisme, dan keahlian di bidangnya. Karena implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan, itu akan berjalan lambat tanpa adanya sumber daya tersebut.

2. Anggaran (*Budgetary*)

Anggaran yang berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi suatu program atau kebijakan menjamin terlaksananya implementasi kebijakan, karena tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (*facility*)

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah terpenuhinya fasilitas atau sarana dan prasarana. Dalam menunjang keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran menjadi prioritas.

4. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah adanya informasi, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan. Tidak kalah penting terkait wewenang berperan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Segala sumber yang berkaitan dengan kebijakan dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Membiasakan hidup sehat, maka akan meningkatkan kesadaran arti pentingnya hidup sehat merupakan hal pokok dalam penyuluhan tentang pentingnya dalam meningkatkan sumber daya manusia bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kegiatan rutin setiap bulan, maka anggaran tetap yang dikeluarkan membuat program tersebut akan berjalan mengikuti kebutuhan kegiatan pembangunan yang tertata dan terperinci sehingga kebiasaan berakibat meningkatnya kesadaran seperti pepatah kebiasaan belum tentu benar tetapi yang benar harus dibiasakan. Perubahan itu harus menjadi kebutuhan, maka fasilitas yang sudah ada akan menjadi lebih baik dan terpelihara, sedangkan fasilitas yang baru akan semakin bertambah. Salah satu kebutuhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat adalah adanya Informasi dan kewenangan yang merupakan suatu kebutuhan dalam mendapatkan informasi, seperti hal yang akan di bangun dan di butuhkan serta kewenangan siapa untuk membangun dan menjaga. Hal ini membutuhkan kesadaran oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Sumber daya manusia (Staff) dalam bentuk apapun persoalannya yang akan dibahas dan bentuk apapun organisasi/ kelompok sangat dibutuhkan, yang jumlah dan skills (kemampuannya) sesuai dengan yang dibutuhkan, begitu juga sumber daya yang akan diolah seperti sumber daya alam apalagi yang potensial akan sangat berarti sekali bila yang mengolahnya berada ditangan orang-orang yang professional dan berakhlak yang mulia.

Sumber daya yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dilaksanakan dan yang mana yang harus

didahulukan. Sumber daya tersebut dapat berwujud menyediakan barang dan jasa disekitar sungai musi, sumber daya untuk memperoleh dan menggunakan dana dan staf dari pemda setempat, sumber daya untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah yang lain.

Fasilitas yang telah memiliki jumlah staf yang memadai, telah memahami apa yang diharapkan darinya dan apa yang harus dilaksanakan, juga telah memperoleh fasilitas yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, namun tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan: ruang kantor, komputer, kendaraan operasional dan sebagainya.

Kegiatan rutin yang dilaksanakan seperti diadakannya penyuluhan tentang pentingnya membiasakan hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan akan meningkatkan pula sumber daya manusia yang professional dan juga sumber daya alam yang ada akan tetap terjaga, baik asset yang sudah ada maupun yang akan dibangun atau dikembangkan.

Diadakannya kegiatan kali bersih beberapa kali dalam 1 (satu) bulan, maka akan menormalisasikan sumber air yang dulunya bersih, akan menjadi bersih kembali seminimal mungkin tidak terdapat sampah yang terlihat seperti enceng gondok, kayu, sampah non organic seperti plastik dll.

Menyemarakkan kembali lomba bidar/ perahu hias tiap tahun agar setiap akan diadakan lomba diadakan kebersihan sungai terlebih dahulu/ dirapihkan, sama seperti jika akan memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan hari jadi kota Palembang 17 Juni 683 Masehi sekitar 1329 tahun, selalu diadakan lomba kebersihan di RT wilayah terutama sekitar sungai musi.

Memperbanyak rumah makan terapung yang indah, bersih dan rapih, sehingga akan mempengaruhi kebersihan disekitar rumah makan, sambil para wisatawan menikmati keindahan sekitar aliran sungai musi.

Mempromosikan/ menghibur berjalan di sepanjang Sungai Musi sampai Pulau Kemaro menggunakan kapal pesiar Putri Kembang Dadar dan kapal pesiar Raja Gentar Alam sambil bersantai menikmati mini bar dan organ tunggal kepada setiap pengunjung/ peserta seminar baik Nasional seperti IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) maupun Internasional, seperti dengan adanya Sea Games dan KTT Negara-negara Islam.

Disposisi (*Disposition*)

Untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dibutuhkan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan. Kejujuran dan komitmen yang tinggi merupakan karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi

dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam implementasi kebijakan melalui sosialisasi kedalam maupun keluar dalam hal ini masyarakat umum, Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik pada umumnya dan khususnya kepada masyarakat di daerah aliran sungai musi.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam tujuan/ sasaran program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat pemda/ masyarakat selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan/ disepakati bersama.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Seperti sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah aliran sungai musi sangat penting sekali untuk memelihara dan menjaga kebersihan sungai melalui komitmen bersama. Untuk itu perlu sekali dalam setiap bulannya diadakan sosialisasi seminimal mungkin satu kali dilaksanakan untuk selalu mengingatkan arti pentingnya kebersamaan dalam menjaga dan memelihara asset yang sudah ada yaitu sungai musi itu sendiri.

Bahwa dengan karakter yang dapat mempengaruhi dari pemerintah daerah pada umumnya yang dulunya jarang mengadakan pameran/ efen-efen tentang pariwisata air jangan hanya HUT RI (Hari Ulang Tahun Republik Indonesia) dan HUT (Hari Ulang Tahun) Kota Palembang dan khususnya dinas pariwisata harus lebih giat dalam mengadakan/ promosi dan mengikuti pameran-pameran efen-efen Nasional (Domestic) seperti perahu bidar/ perahu naga untuk saling mengajak menarik wisatawan dalam negeri maupun Internasional (Manca Negara). Lomba perahu naga, venus sky air di Jakabaring untuk mengundang/ menarik wisatawan negara-negara luar negeri, sekarang perlu dijadikan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan masukan dan saran dari masyarakat Kota Palembang terutama di sekitar sungai musi.

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Dalam implementasi kebijakan Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation prosedur (SOP) dengan perda khusus secara cepat dalam mengatur kebijakan dan tidak dipersulit. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan akan lebih jelas dan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya ada standart operation prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Implementasi kebijakan dilaksanakan secepatnya harus melibatkan lebih dari satu institusi harus dan ada perda khusus yang mengaturnya, sehingga memperjelas serta menjadi acuan dari kebijakan itu sendiri untuk menghindari monopoli kegiatan sehingga sasaran yang akan dicapai fokus kesatu tujuan yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana.

Semua kegiatan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut berdasarkan tanggungjawab, siapa pelaksananya, berhubungan kepada siapa dilakukan secara kelompok atau perorangan, jadi semua yang memberi tanggungjawab dan melaksanakan kebijakan tersebut secara profesional.

Dalam menempatkan fasilitas-fasilitas penunjang, seperti MCK (Mandi, Cuci, Kakus) umum, bak/ tempat sampah dan memenuhi fasilitas lain seperti pengadaan air bersih yang mendukung, agar signifikan dengan program yang diinginkan oleh pemerintah dan dibutuhkan oleh masyarakat dilingkungan sekitar khususnya, tetapi dapat dinikmati oleh siapa saja, sehingga mau atau tidak mau budaya hidup bersih dan sehat

serta menerapkan rasa malu apabila lingkungan sekitar itu kotor akan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Perlu peningkatan kesadaran dalam kebersihan masyarakat di sekitar Sungai Musi dalam meningkatkan pariwisata air di Kota Palembang, pertama, dari komunikasi yang lebih sering melalui penyuluhan yang melibatkan semua pihak, kedua, dari sumber daya alam yang berpotensi didukung oleh sumber daya manusia yang profesional melalui kemampuan yang bersifat pengetahuan dan keterampilan, ketiga, dari disposisi atau tingkah laku/ karakteristik masyarakat yang sebenarnya ingin membangun dan mengembangkan serta berkemauan keras dalam mendukung program pemerintah daerah dalam memajukan pariwisata, keempat, struktur birokrasi, dari sistim birokrasi yang tidak berbelit-belit (sederhana) akan mempermudah dalam pelaksanaan mengimplementasikan kebijakan pariwisata air melalui peran dinas pariwisata.

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam mengimplementasikan kebijakan pariwisata air, sesuai Peraturan Daerah kota Palembang no. 14 Tahun 2007 tentang kepariwisataan yaitu tidak semua lapisan masyarakat ikut serta disebabkan kesibukan dan kepentingan yang tidak sama, minimnya sumber daya manusia dan dukungan sarana dan prasarana, minimnya pembinaan teknis masyarakat setempat (OKI) dan (OKU) oleh dinas terkait dalam hal ini dinas pariwisata dan kurangnya pengawasan dan sinergi antara masyarakat dan pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astana, S., Djaenudin, D., Wibowo, L. R., Haryono, L. G., Parlinah, N., & Indartik, I. (2007). Dampak Pengganda Industri Pembibitan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 4(1), 19-55.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2009). *Sumatera Selatan dalam Angka Tahun 2009*. Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. Palembang.
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Penerimaan Devisa Negara Indonesia*. BPS. Jakarta.
- Balai Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Sumatera Selatan. (2010). Rekap Data Pengunjung Hutan Wisata Punti Kayu Palembang Periode Tahun 1999-Oktober 2010. BKSDA Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.
- HS, Y. T., & Kristian, I. (2021). Model Collaborative dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Garut. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 69-81.
- Kristian, I. (2022). Decision Making in Disaster Management Operations: Challenges and Opportunities. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 4(2), 82-91.

- Kristian, I. (2023). The Role of Tourism Awareness Groups in increasing Tourist Visits in West Bandung Regency (Case Study at Ciburuy Tourism Object). *The International Journal of Education Management and Sociology*, 2(2), 78-83.
- Pendit, N. S. (1999). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Daerah
- Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataaan.
- Rifqa. (2010). *Analisis Dampak Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Sebagai Kawasan Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Masyarakat Lokal (Studi Kasus: Pantai Swarna, Lebak, Banten)*. Skripsi. Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Rowe, A., John, D. S., & Fiona, B. (2002). *Travel and Tourism*. Cambridge University Press.
- SK Menteri Kehutanan No. 57/KPTS II/1985. Pergantian Nama Taman Syailendra menjadi Hutan Wisata Punti. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
- SK Menteri Kehutanan No. 687/KPTS II/1989. Pengertian Hutan Wisata. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
- Sudrajat, Y., & Kristian, I. (2022). Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(2), 116-127.
- Susilowati, M. I. (2009). Valuasi Ekonomi Manfaat Rekreasi Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Dengan Menggunakan Pendekatan Travel Cost Method.
- UU No. 5 Tahun 1990. Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang Republik Indonesia.
- UU No. 9 Tahun 1990. Pengertian Pariwisata. Undang-Undang Republik Indonesia.
- Vanhove, N. (2005). *The Economics of Tourism Destinations*. Oxford Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford University. United Kingdom.
- Walpole, R. E. (1993). *Pengantar Statistika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yuyus, E. R. (2010). *Panduan Objek Wisata Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.